

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi



Tahun
2020

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN SIDENRENG

Kata Pengantar

وَبَرَكَاتُهَا لِلَّهِ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

LKjIP Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2021

Kepala Dinas,

Ir. RULI, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19640727 199603 1 002

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Di dalam rencana strategis tersebut terdapat kondisi yang diharapkan pada akhir periode serta capaian tiap tahunnya. DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipologi organisasi C, dan menyelenggarakan 32 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2021 DPMPTSP merumuskan 2 Indikator Kinerja Utama, dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk mewujudkannya, dilaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 32,48% pada belanja langsung, sejumlah Rp. 1.022.593.000,-.

Hasil pengukuran menunjukkan dari 2 indikator kinerja utama, 1 indikator mencapai 58,46% ini jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, sedangkan indikator IKM belum bisa mencapai 100%. Realisasi anggaran yang terserap sampai akhir tahun sebesar 99,81% dari total belanja pada Belanja Langsung, dengan porsi belanja modal hanya sebesar 1,2%.

Upaya peningkatan kinerja selalu diupayakan dengan beberapa langkah strategis dan aplikatif, demi mencapai indikator yang telah ditargetkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
PENDAHULUAN	1
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
1. Susunan Organisasi Dinas	2
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas	4
D. Sumber Daya OPD	10
E. Sarana dan Prasarana Kantor	12
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	13
G. Sistematika Penulisan	14
A. Perencanaan Strategis	15
1. Visi	15
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran	15
PERENCANAAN KINERJA	15
4. Strategi dan Kebijakan	17
5. Program dan Kegiatan	17
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Perjanjian Kinerja	19
1. Rencana Anggaran Tahun 2020	19
2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	22
3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	22
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran.....	29
A. Kesimpulan	34
B. Strategi Peningkatan Kinerja	34
PENUTUP	34
Lampiran - Lampiran	36
INDIKATOR KINERJA UTAMA	37
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37
TAHUN 2021.....	37
Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas.....	38
Periode Januari s.d Desember 2020.....	38
Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP	40
Periode Januari s.d Desember 2020.....	40

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
--	---

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan	11
Tabel 2.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3.	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan.....	11
Tabel 4.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN dari SKPD Lain Yang Diperbantukan pada Dinas PM-PTSP sebagai Tim Teknis	11
Tabel 5.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP	12
Tabel 6.	Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP.....	12
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang.....	16
Tabel 8.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.....	18
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.....	19
Tabel 10.	Target Belanja Tahun 2020	20
Tabel 11.	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2020.....	20
Tabel 12.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2020	20
Tabel 13.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 14.	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Tahun 2019	22
Tabel 15.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
Tabel 16.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah.....	23
Tabel 18.	Klasifikasi Sektor Investasi PMDN	24
Tabel 19.	Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	25
Tabel 20.	Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – September Tahun 2020	27
Tabel 21.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	28
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 23.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	29
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020.....	30
Tabel 25.	Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan	32

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020** yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

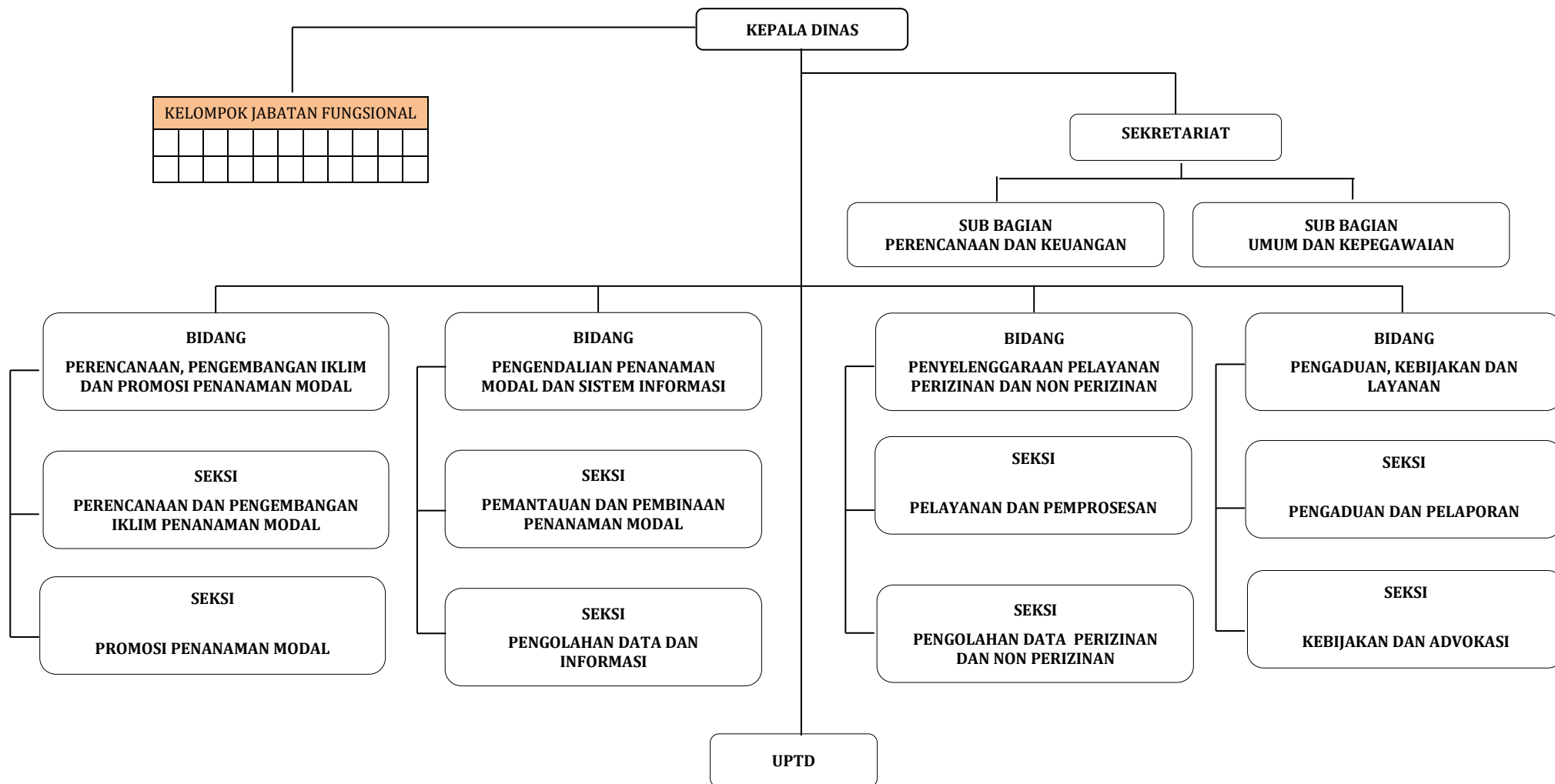
Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinasterdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 1) Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.
- g. Jabatan Fungsional.
- h. UPT Dinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.
- Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 12) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, dinas;
- 15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 17) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sbb:
 - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun perencanaan program peluang investasi daerah;
- 8) Memfasilitasi penyusunan draft Perda pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- 9) Menyediakan peta potensi penanaman modal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- 11) Memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
- 13) Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- 14) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- 15) Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 16) Menyelenggarakan penyusunan data statistic dan publikasi pengembangan investasi;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- 18) Menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kabid Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 8) Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
 - 9) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 10) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal;
 - 11) Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 4) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan tim teknis peninjauan lapangan;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;
 - 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 3) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;
- 8) Menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
- 9) Memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- 10) Menangani pengaduan masyarakat;
- 11) Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
- 12) Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
- 13) Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
- 14) Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Pelayanan Perizinan secara berkala;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk :

- a. Menertibkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya termasuk dalam perpanjangan / pendaftaran ulang / perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Menyelenggarakan koordinasi tim teknis dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. Memberikan sanksi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan penanganan pengaduan beserta solusinya; dan
- f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang dilakukan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- a. Berbayar
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 2) Izin Trayek Angkutan
 - 3) Izin Pemasangan Reklame
- b. Tidak Berbayar
 - 1) Izin Penanaman Modal
 - 2) Izin Lingkungan
 - 3) Surat Izin Apotek
 - 4) Surat Izin Toko Obat
 - 5) Izin Klinik
 - 6) Surat Izin Praktek Dokter
 - 7) Surat Izin Praktek Perawat
 - 8) Surat Izin Praktek Bidan
 - 9) Surat Izin Praktek Apoteker
 - 10) Surat Izin Praktek Fisioterafis
 - 11) Surat Izin Praktek Radiografer
 - 12) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
 - 13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian
 - 14) Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut
 - 15) Surat Izin Praktek Perekam Medis
 - 16) Surat Izin Praktek Ahli Tek. Lab. Medik
 - 17) Tanda Daftar Gudang
 - 18) Tanda Daftar Perusahaan
 - 19) Surat Izin Usaha Perdagangan
 - 20) Surat Tanda Daftar Industri
 - 21) Surat Izin Usaha Industri
 - 22) Surat Izin Tempat Usaha
 - 23) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - 24) Izin Operasional Penggilingan (Lisensi)
 - 25) Izin Sarana Produksi Pertanian
 - 26) Izin Usaha Perikanan
 - 27) Izin Usaha Peternakan
 - 28) Izin Penelitian
 - 29) Izin Kegiatan

D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	5	1	0	7
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	1	2	0	0	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	1	2	0	0	3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	3	0	0	4
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	0	4	0	0	4
	JUMLAH	5	16	1	0	22

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	S1	11
3.	Diploma	1
4.	SLTA Sederajat	1
TOTAL		22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	15	8	7
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	7	4	3
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	7	3	4
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	16	4	12
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	7	3	4
JUMLAH	52	22	30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2020

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari

kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 52 PNS hanya tersedia 22 orang PNS atau 42% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi dan Konsultasi	3
2.	Petugas SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	2
3.	Petugas Bagian Pendaftaran	2
4.	Petugas Bagian Penyerahan	1
5.	Petugas Bagian Pemrosesan Pertama	1
	Petugas Bagian Pemrosesan Kedua	1
6.	Petugas Bagian Pencetakan	2
7.	Petugas Pengumpul Data Tim Teknis	1
8.	Petugas E-Signature & QR Code	1
9.	Petugas Server Perizinan	1
10.	Petugas Antrian (<i>Guide Customer</i>)	1
11.	Petugas Arsip Perizinan	1
	Petugas Call Center	1
12.	Operator Aplikasi	4
13.	Pengemudi	1
TOTAL		23

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas PM-PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 45 orang.

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2020, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	CCTV	1			1

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
3.	AC Split	12			12
4.	Meja Kerja	30	1		31
5.	Komputer PC	14			14
6.	Printer	15			15
7.	Kursi Kerja	2			2
8.	Laptop	5			5
9.	Meja Reseption	3			3
10.	Bangku Tunggu	2			2
11.	Televisi	1			1
12.	Router	1			1
13.	Wireless Access Point	1			1
14.	Kursi Tamu	1			1
15.	Mesin Potong Rumput	1			1
16.	Proyektor + Attachment	1			1
17.	Motor	11			11
18.	Mobil	1			1
19.	Layar Proyektor	1			1
Total		113	1	0	114

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang. DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan, dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Solusi yang telah dilakukan mengajukan RKBU;
2. Kurangnya jumlah PNS
Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kab. Sidenreng Rappang dan mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bimtek;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor
4. Koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok

persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan;

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

2

PERENCANAAN

A. Perencanaan Strategis

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah Visi Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

2. Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah merupakan Misi ke 3 dan 5 dari Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah;
- b. Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (GG + E Gov).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi	Meningkatnya nilai investasi di daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN dan PMA	Rp. 157.002.306.000	Rp. 157.052.306.000	Rp. 157.127.306.000	Rp. 157.227.306.000	Rp. 157.227.306.000
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	90

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yakni memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi yang ditetapkan:

- a. Peningkatan Promosi
Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan *terupdate*, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.
- b. Penyempurnaan Regulasi
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Berbasis IT
Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
- d. Peningkatan SDM Pelayanan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal.
- e. Peningkatan Sarana Prasarana
Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.
- f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 9) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 1) Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - 2) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 3) Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - 1) Penyediaan Jasa Pelayanan
 - 2) Pengolahan Data Pelayanan Perizinan
 - g. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan
 - 1) Kajian/Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Laporan

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Investasi PMDN dan PMA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp. 157.052.306.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.828.052.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.3.148.357.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.125.764.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.022.593.000,-. Adapun Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.129.653.959,- (99%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.109.506.120,- (67,40%) dan

Belanja Langsung sebesar Rp.1.020.147.839,- (32,60%).

2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 7. Target Belanja Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.125.764.000,-	2.109.506.120,-	98,99-
2.	Belanja Langsung	1.022.093.000,-	1.020.147.839,-	99,81-

Tabel 8. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	450.228.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.827.000,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.310.000,00
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	89.661.000,00
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	0,
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	185.085.000,00
7.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	69.482.000,00
Total		1.022.290.000,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	186.293.000,00	14,02%	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	1.142.186.000,00	85,98%	
Total		1.334.479.000,00	100,00%	

3

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 2 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2020.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk Pengukuran Persentase Kenaikan Kinerja adalah:

$$\% \text{ Kenaikan Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,82	21,58
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,81	17,81
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,15	10,61
4.	Evaluasi Kinerja	10	4,12	6,08
5.	Capaian Kinerja	20	15,86	12,38
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,76	68,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			C	B

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	Rp. 157.052.30 6.000	Triwulan I	39.263.076. 500	23.245.000.000	59,2032 1
					Triwulan II	39.263.076. 500	4.418.500.000	11,2535 8
					Triwulan III	39.263.076. 500	21.868.425.000	55,6971 8
					Triwulan IV	39.263.076. 500	155.587.074.753	396,268 2
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	Triwulan I		0	
					Triwulan II		0	
					Triwulan III		0	
					Triwulan IV	83	77,069	92,85

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng

Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 - 2023 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah”**. Adapun Indikator Kinerja Utamanya ada 1 (satu) yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA.

Penanaman modal itu baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2019	2020	
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.052.306.000	3.035.741.061.251	205.118.999.753	130,61

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000	205.118.999.753	130,46

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 130,61% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**.

Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 205.118.999.753,-. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMDN dan PMA adalah realisasi nilai investasi yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 3.035.741.064.251,- sehingga penurunan menjadi 6,76%. Untuk data rekapan PMDN/PMA untuk modal menengah ke atas periode Januari s.d Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Untuk capaian realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 130,61%. Data investasi PMDN kumulatif yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp. 205.118.999.753,- dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.035.741.064.251,-. Nilai investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pertanian	24	36.012.325.000,00
2.	Industry Pengolahan	5	6.250.000.000,00
3.	Listrik, Gas, Air Bersih	2	131.081.674.753,00
4.	Bangunan	5	6.250.000.000,00
5.	Perdagangan, Hotel & Restoran	10	12.635.000.000,00
6.	Jasa-jasa	2	12.890.000.000,00
Jumlah			205.118.999.753

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 2 (dua) Program dengan 4 (empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Peningkatan terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
 - b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - c) Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Pengembangan system informasi penanaman modal

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.89.661.000,- dari anggaran sebesar Rp.186.293.000,- atau 48,13% dari target. Realisasi kinerja sebesar 130,61%.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya** menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Untuk mengetahui besarnya maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total dari Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 16. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Survey yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Lapagala Institute dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengukur kualitas pelayanan pada periode pelayanan Januari – September 2020 pada 8 (delapan) OPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item yang didalamnya meliputi:

- 1) Persyaratan
Kinerja unsur pelayanan ini Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan pada skala prioritas. Misalnya kejelasan persyaratan melalui sosialisai berbasis sistem online dan penyederhaan persyaratan.
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Kinerja unsur pelayanan dinilai Kurang Baik, sehingga harus diperbaiki dan menjadi skala prioritas, Misalnya penyerdahanaan sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
- 3) Waktu Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan skala prioritas. Misalnya lebih mempersingkat waktu pelayanan, khususnya pada perizinan Usaha dan IMB
- 4) Biaya/Tarif
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 5) Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga kompetensi harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Misalnya mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menuliskan berkas yang diproses; peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan berbasis online.
- 7) Perilaku Pelaksana
Kinerja perilaku pelaksana pelayanan dinilai Baik perilaku pelaksana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebih. Sehingga petugas dapat lebih memaksimalkan waktu pelayanan; lebih responsig; dan penampilan pelaksanaan yang tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris dan penggunaan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kineja unsur pelayanan ini dinilai Baik, yang harus dipertahankan. Misalnya ketersediaan dan berfungsi unit layanan aduan.

9) Sarana dan Prasarana

Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, Sarana dan Prasarana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Misalnya pengoptimalisasian sistem pelayanan secara online, tersedianya jaringan internet, sarana dan kebersihan khususnya toilet dan parkir.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Unit Pelayanan Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – September Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	Atribusi Kepuasan						Kinerja
		Nilai Rata-rata Pelayanan	Nilai Rata-rata Harapan	Nilai GAP	SKM	NIK	Mutu Pelayanan	
1	Persyaratan	2,969	3,039	0,070	0,327	74,225	C	Kurang Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,000	3,101	0,101	0,330	75,000	C	Kurang Baik
3	Waktu Pelayanan	3,064	3,006	0,058	0,337	76,599	C	Kurang Baik
4	Biaya / Tarif	3,321	3,214	0,107	0,365	83,023		Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	2,961	3,047	0,085	0,326	74,031	B	Kurang Baik
6	Kompetensi Pelayanan	2,992	3,031	0,039	0,329	74,806	C	Kurang Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,221	3,017	0,203	0,354	80,523	C	Kurang Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,346	3,140	0,206	0,368	83,638	B	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,151	3,000	0,151	0,347	78,779	B	Baik
	Nilai Rata-Rata	3,114	3,066	0,048	3,083	77,069	B	Baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Perizinan Kab. Sidrap (NIK)					77,069	B	Baik

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2019	2020	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	75,849	77,069	92,85

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	77,069	85,632

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 ini adalah **77,069 (Baik)** dari target sebesar 83 atau tercapai sebesar 94,81% dan masih masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori **Baik**, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maka terdapat kenaikan sebesar 1,22% yakni dari 75,849 pada tahun 2019 menjadi 77,069 pada tahun 2020. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 85,632%.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 5) Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.930.486.839,00 dari anggaran sebesar Rp.1.142.186.000,00 atau 81,47% dari target. Realisasi kinerja sebesar 92,85%, masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	157.052.306.000	205.118.999.753	130,61	6.162.000	6.162.000	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	77,069	92,85	21.375.000	21.375.000	100

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun anggaran 2020 DPMPTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.148.857.000 dengan penyerapan sebesar Rp.3.129.653.959 atau 99%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.125.764.000 dengan penyerapan sebesar Rp.2.109.506.120 atau 98,59% dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.022.593.000 dengan penyerapan sebesar Rp.1.020.149.839 atau 91,90%, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 30 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung		2.125.764.000	2.109.506.120	99,23
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.571.952.256	1.566.530.339	99,65
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	553.811.744	542.975.781	98,06
Belanja Langsung		1.022.593.000	1.020.149.839	99,76
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.488.000	1.488.000	100
2.	Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.340.000	35.939.233	82,10
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.969.000	2.969.000	100
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000	4.108.560	61,78
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.921.000	10.921.000	100
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.297.000	29.677.000	99,6
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	996.000	996.000	100
8.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	2.000.000	1.996.000	99,87
9.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	60.242.000	60.239.550	99,99
10.	Pelayanan administrasi perkantoran	299.475.000	299.469.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000	5.000.000	100
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	156.085.000	156.085.000	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.582.000	23.582.000	99,93
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.160.000	36.157.596	99,99
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.740.000	4.740.000	100

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.040.000	1.040.000	100
3.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.530.000	1.530.000	100
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
1.	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri /Penanaman Modal Asing	1.339.000	1.339.000	100
2.	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha	19.868.000	19.868.000	99,31
3.	Pengembangan Potensi Keunggulan Daerah	6.765.000	6.765.000	99,92
4.	Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Moda	6.027.000	6.027.000	100
5.	Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecl Menengah	49.500.000	49.500.000	100
6.	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	6.162.000	6.162.000	100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
1.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	0	0	100
Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan				
1.	Kajian/Analisa Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	21.357.000	21.357.000	100
2.	Kajian/ Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	1.184.000	1.184.000	100
3.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	31.650.000	31.650.000	100
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	15.291.000	15.291.000	100
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan				
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	150.949.000	150.930.900	99,40
2.	Kegiatan Pengolahan Data Pelayanan Perizinan	34.136.000	34.136.000	98,61
TOTAL		3.148.357.000	3.129.653.959	95,63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang memperoleh pagu anggaran awal tahun pada belanja langsung sebesar Rp.1.334.479.000,00,- dan mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun anggaran menjadi Rp.1.022.593.000,- (turun sebesar Rp.311.886.000,-). Penurunan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Disamping pengurangan anggaran pada

beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya diefisienkan menyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan. Penyesuaian tersebut dialokasikan pada kegiatan berikut:

Tabel 22. Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2020		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000	1.488.000	↓
2.	Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.340.000	35.939.233	↓
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.969.000	2.969.000	↓
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000	4.108.560	↓
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.921.000	10.921.000	=
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.797.000	29.677.000	↓
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.008.000	996.000	↓
2.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	2.000.000	1.996.000	↓
3.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	151.885.000	60.239.550	↓
4.	Pelayanan administrasi perkantoran	335.275.000	299.469.000	↓
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	=
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	160.305.000	156.085.000	↓
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	23.582.000	23.582.000	=
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.560.000	36.157.596	↓
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.740.000	4.740.000	=
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.040.000	1.040.000	=
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.530.000	1.530.000	=
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
1.	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri /Penanaman Modal Asing	13.589.000	1.339.000	↓
2.	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha	21.193.000	19.868.000	↓
3.	Pengembangan Potensi Keunggulan Daerah	46.664.000	6.765.000	↓
4.	Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal	15.760.000	6.027.000	↓
5.	Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecl Menengah	50.000.000	49.500.000	↓
6.	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	19.087.000	6.162.000	↓
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
1.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	20.000.000	0	↓

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2020		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan				
1.	Kajian/Analisa Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	26.657.000	21.357.000	↓
2.	Kajian/ Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	7.934.000	1.184.000	↓
3.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	31.650.000	31.650.000	
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	19.791.000	15.291.000	↓
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan				
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	163.736.000	150.930.900	↓
2.	Kegiatan Pengolahan Data Pelayanan Perizinan	49.366.000	34.136.000	↓
TOTAL		1.334.479.000	1.020.147.839	↓

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kegiatan dan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Sidenreng Rappang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.Tahapan perencanaan telah dijalankan dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kinerja serta penetapan kinerja. Pelaksanaan kegiatan juga telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta adanya evaluasi dan penyesuaian sehingga pada anggaran perubahan juga telah diusulkan beberapa kegiatan tambahan demi mencapai pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan diketahui capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun ini, 2 Indikator Kinerja Utama belum bisa mencapai 100%.

Realisasi anggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 telah menyerap anggaran 99,81% yaitu sebesar Rp.1.020.147.839,- pada belanja langsung. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur manajemen yang baik yaitu setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif karena kegiatan itu dari sisi input tidak melebihi pagu yang ditetapkan dan dari sisi output kegiatan itu dapat terealisasi dengan baik serta dari sisi outcome kegiatan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja harus selalu diupayakan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) agar lebih realistis dalam pelaksanaannya dan memberikan kaidah yang baku dalam implementasinya.
2. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
4. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani analisis standar biaya yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan lebih intensif terhadap rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan termasuk dengan memperhatikan alokasi anggaran kas yang lebih realistis dan berimbang.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan beban kerja, sehingga dapat mmeberikan performa yang optimal dan efektif dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan.
7. Secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan agar selalu sesuai dengan tuntutan pelayanandan kebutuhan masyarakat.

Lampiran - Lampiran



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah</i>	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya</i>	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2021
Kepala Dinas PMPTSP

Ir. RULI, MT
Nip. 19640727 199603 1 002

**Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas
Periode Januari s.d Desember 2020**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Modal Usaha dan Realisasi (Rp)	PMDN/PMA
1.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	JL. JEND. SUDIRMAN No. 188, KEL. MAJJELLING, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA JASA PERBANKAN	1.250.000.000	PMDN
2.	CV. ANUGRAH FARMA	JL. LANTO DG PASEWANG, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA PEGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN	800.000.000	PMDN
3.	PT. DESTRA AIR MAS	JL. POROS BULO No. 77 LANRANG, DESA TIMORENG PANUA	▪ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.340.000.000	PMDN
4.	PT. SALWA SALFA UTAMA	JL. A. MANGKAU No.2, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA JASA KONSTRUKSI	1.250.000.000	PMDN
5.	PT. MEKARITA RANGA JAYA	JL. HOS COKRO AMINOTO No.7, KEL. MAJJELLING, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA DEVELOPER	2.000.000.000	PMDN
6.	PT. PRAWIRA ABDI NEGARA	JL. ANDI PAKKANNA No. 85, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ PENGECER PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN (BERAS)	1.000.000.000	PMDN
7.	RAHMA TANI 35	JL. ANOA, KEL. LAUTANG BENTENG, KEC. MARITENGGAE	▪ PENGECER JUAL SUKU CADANG (MOBIL)	650.000.000	PMDN
8.	CV. BENTENG UTAMA	JL. A. CAMMI BARAT, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGGAE	▪ PENGECER PERDAGANGAN DAN INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	1.000.000.000	PMDN
9.	CV. MEGA TAMA MANDIRI	JL. GANGAGAWA, KEL. MAJJELLING, KEC. MARITENGGAE	▪ DISTRIBUTOR PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGRO KIMIA	1.500.000.000	PMDN
10.	PT. BIANGLALA INDODEI ENERGI	JL. BAU MASSEPE No.10, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA	550.000.000	PMDN
11.	PT. ARMIN PUTRA PERDANA	JL. ATAKKAE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU	▪ JASA PERTAMBANGAN GALIAN BATU DAN STONE CRUSHER (PABRIK PEMECAH BATU)	1.500.000.000	PMDN
12.	TOKO ALIF COMPUTER	JL. JEND. SUDIRMAN No. 248, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ PENGECER JUAL KOMPUTER	1.000.000.000	PMDN
13.	PT. ANUGRAH MATTUJU TUJU	JL. LANTO DG. PASEWANG No. 163 C, KEL. PANGKAJENE	▪ JASA DEVELOPER	2.000.000.000	PMDN
14.	CV. SIDENRENG MASSAGONI HOTEL	JL. M. JUNAID No. 11, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE	▪ JASA JASA PERHOTELAN	505.000.000	PMDN

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Modal Usaha dan Realisasi (Rp)	PMDN/PMA
15.	TOKO ATTAR	JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGECEK ▪ JUAL BARANG CAMPURAN (Tidak Jual Miras & Obat Terlarang) 	550.000.000	PMDN
16.	PT. RIZKY ASTRI AS-SALAM	JL. POROS PAREPARE RAPPANG, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISTRIBUTOR ▪ DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI 	1.000.000.000	PMDN
17.	CV. SIPAKAENRE	JL. HAJI MAGGA, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERKULAKAN ▪ PENGGILING PADI DAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN (BERAS) 	1.000.000.000	PMDN
18.	CV. KUR AGRO LESTARI	BOJOE, KEL. ARAWA, KEC. WATANG PULU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISTRIBUTOR ▪ PETERNAK SAPI 	5.000.000.000	PMDN
19.	CV. AGUS JAYA	JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. BATU LAPPA, KEC. WATANG PULU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGECEK ▪ PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN 	550.000.000	PMDN
20.	PETERNAKAN MAMMINASAE	JL. PETANI, DESA LISE, KEC. PANCA LAUTANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGECEK ▪ PETERNAKAN SAPI & JUAL BELI HASIL PETERNAKAN (SAPI) 	600.000.000	PMDN
21.	PB. HSJ	Dusun Bendoro Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERKULAKAN ▪ PENGGILINGAN PADI 	1.500.000.000	PMDN
22.	PT. NUGRAHA RIAU SEJAHTERA	JL. SOPPAE, KEL. LANCIRANG, KEC. PITU RIAWA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JASA ▪ DEVELOPER 	1.000.000.000	PMDN
23.	PB. HASNA	JL. LASIWALA, KEL. PONRANGAE, KEC. PITU RIAWA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ USAHA PERDAGANGAN ▪ PENGGILINGAN PADI 	800.000.000	PMDN
24.	KRISMAN NIRWANA	JL. BOLA BULU, DESA BILA, KEC. DUA PITUE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JASA PENYEWAAN ALAT BERAT DENGAN OPERATOR 	1.500.000.000	PMDN
25.	CV. SINAR TANI MANDIRI	JL. POROS BARUKKU, DESA BILA RIASE, KEC. PITU RIASE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JASA ▪ PERTAMBANGAN PASIR DAN BATUAN (SIRTU) 	1.000.000.000	PMDN
26.	TIGA PUTRA	JL. KORBAN 40.000, KEL. BARANTI, KEC. BARANTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGECEK ▪ JUAL ALAT PRODUKSI PERTANIAN 	530.000.000	PMDN
27.	PT KARYA HARAPAN SIDENRENG	JL. LANTO DAENG PASEWANG NO.37 KEC. MARITENGGAE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JASA ▪ DEVELOPER 	1.000.000.000	PMDN
28.	PT.ZAFA CIPTA MANDIRI	JL.JEND.SUDIRMAN 182 KEL. MAJJELLING KEC. MARITENGGAE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JASA ▪ DEVELOPER 	1.500.000.000	PMDN
29.	UPC-SBE2	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB) 	130.531.674.573	PMA

**Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP
Periode Januari s.d Desember 2020**

No.	Nama Izin	Jumlah	
		Surat Izin Keluar	Pajak / Retribusi (Rp)
1.	<i>Ijin Trayek Angkutan</i>	424	10.600.000
2.	<i>Ijin Mendirikan Bangunan</i>	1283	1.097.395.390
3.	<i>Tanda Daftar Perusahaan</i>	260	0
4.	<i>Surat Ijin Usaha Perdagangan</i>	186	0
5.	<i>Izin Pemasangan Reklame</i>	399	403.377.607
6.	<i>Surat Ijin Tempat Usaha</i>	598	0
7.	<i>Tanda Daftar Gudang</i>	7	0
8.	<i>Izin Usaha Industri</i>	10	0
9.	<i>Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi</i>	29	0
10.	<i>Surat Izin Apotek</i>	21	0
11.	<i>Surat Izin Toko Obat</i>	5	0
12.	<i>Izin Klinik</i>	2	0
13.	<i>Surat Izin Praktek Dokter</i>	44	0
14.	<i>Surat Izin Praktek Perawat</i>	156	0
15.	<i>Surat Izin Praktek Bidan</i>	140	0
16.	<i>Surat Izin Praktek Apoteker</i>	34	0
17.	<i>Surat Izin Praktek Fisioterafis</i>	3	0
18.	<i>Surat Izin Praktek Radiografer</i>	1	0
19.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Gizi</i>	3	0
20.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Teknis</i>	59	0
21.	<i>Surat Izin Praktek Ahli Teknologi</i>	6	0
22.	<i>Surat Izin Praktek Perekam Medis</i>	1	0
23.	<i>Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut</i>	4	0
24.	<i>Izin Operasional Penggilingan</i>	23	0
25.	<i>Izin Penelitian</i>	454	0
26.	<i>Izin Usaha Peternakan</i>	37	0
27.	<i>Izin Kegiatan</i>	2	0
28.	<i>Izin Sarana Produksi Pertanian</i>	22	0
Jumlah Surat Izin Pajak / Retribusi		4213	1.510.638.297